



<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/psnp>

Seminar Nasional Humanesia Pascasarjana

(Humaniora, Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Hukum dan Sosiologi)

Universitas Kristen Indonesia Paulus

Makassar, Indonesia



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DP3AKB KABUPATEN TELUK BINTUNI

Erni Silambi¹*

¹ Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

korespondensi@email.com (Korespondensi)*

Keyword:

Financial
Performance,
Regional Financial
Management,
Regional Government
Organization,
DP3AKB.

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan,
Pengelolaan
Keuangan Daerah,
Organisasi Perangkat
Daerah, DP3AKB.

Abstract: *This study aims to analyze the financial performance of the Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3AKB) of Teluk Bintuni Regency from the perspective of financial management officers, to describe the financial management process from planning, implementation, to budget reporting, and to identify the obstacles and efforts made to improve financial performance. This research employed a qualitative descriptive approach. The informants consisted of the Head of the Department, the Head of the Planning and Finance Subdivision, the Expenditure Treasurer, and two planning and finance operators. The results indicate that the financial performance of DP3AKB Teluk Bintuni Regency has generally been good, as reflected in the implementation of programs according to the planned targets and accountable financial management. The financial management process has been carried out in accordance with the stages of regional financial management, including planning, implementation, administration, reporting, and accountability.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan perspektif para pengelola keuangan, mendeskripsikan proses pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, serta dua orang operator bagian perencanaan dan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni secara umum telah berjalan dengan baik, ditandai dengan pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan serta pengelolaan anggaran yang akuntabel. Proses pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab. Salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan tersebut adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan suatu instansi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja keuangan menjadi sangat penting guna memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu OPD yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran yang memadai serta pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, kinerja keuangan DP3AKB menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut.

Kabupaten Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah di Provinsi Papua Barat memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi potensi sumber daya maupun tantangan geografis dan sosial. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan program-program pembangunan, termasuk yang dijalankan oleh DP3AKB. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kinerja keuangan pada instansi tersebut, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Analisis kinerja keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang telah dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi instansi yang bersangkutan, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni. Namun, berbagai tantangan dan permasalahan yang ada menuntut adanya evaluasi yang komprehensif terhadap pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul ***"Analisis Kinerja Keuangan pada***

DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni” guna memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai kondisi kinerja keuangan pada instansi tersebut.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif**. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam terkait kinerja keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni, terutama dalam proses pengelolaan keuangan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja keuangan.

2.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada **DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni**. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki peran penting dalam pengelolaan program sosial yang membutuhkan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel.

Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

2.2 Informasi Penelitian

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2019), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu informan yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepala DP3AKB
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Bendahara
4. Staf pengelola keuangan

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memahami secara nyata kondisi serta proses pengelolaan keuangan yang terjadi di DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap:

- Proses pengelolaan keuangan
- Aktivitas penyusunan dan pelaksanaan anggaran
- Interaksi antar pegawai dalam pengelolaan keuangan

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan guna memperoleh informasi yang mendalam.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan tetapi tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan secara luas.

Wawancara dilakukan kepada:

- Kepala DP3AKB
- Kepala bagian keuangan
- Bendahara
- Staf pengelola keuangan

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2017), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berasal dari catatan, arsip, buku, atau dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Laporan keuangan
- Dokumen anggaran (RKA, DPA)
- Laporan realisasi anggaran
- Arsip kegiatan

2.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengabstraksi data yang diperoleh dari lapangan. Menurut Matthew B. Miles dkk. (2014), reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan:

- Menyeleksi data yang relevan
- Mengelompokkan data sesuai fokus penelitian
- Menghilangkan data yang tidak diperlukan

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar data mudah dipahami. Menurut John W. Creswell (2014), data display dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks naratif atau bagan yang membantu peneliti memahami informasi secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk:

- Uraian naratif

- Matriks sederhana (jika diperlukan)
- Kutipan hasil wawancara

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan proses penarikan makna dari data yang telah dianalisis.

Menurut Matthew B. Miles dkk. (2014), penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dan diverifikasi agar hasilnya valid.

Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh dengan:

- Membandingkan antar informan
- Mengaitkan dengan teori yang digunakan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Teluk Bintuni. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima orang informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan keuangan, yaitu Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, serta dua orang operator bagian perencanaan dan keuangan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi dan studi dokumentasi untuk memperkuat data yang diperoleh.

Penyajian hasil penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian sehingga mampu menggambarkan kondisi nyata mengenai kinerja keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni.

3.1.1 Kinerja Keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni Berdasarkan Prespektif dan pengembangan Para Pengelola Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni, diketahui bahwa secara umum kinerja keuangan instansi telah berjalan dengan baik. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Menurut informan, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya dinilai dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari kemampuan setiap program dalam memberikan manfaat kepada masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang menjelaskan bahwa sebagian besar target program telah berhasil direalisasikan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun pada awal tahun anggaran. Seluruh proses pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut informan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara pimpinan, bendahara, operator, dan seluruh pelaksana kegiatan.

Sementara itu, Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa dari aspek administrasi keuangan, setiap transaksi dilakukan sesuai prosedur mulai dari proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D). Seluruh transaksi didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurut informan, ketelitian dalam administrasi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan menghindari kesalahan administrasi.

Operator bagian perencanaan dan keuangan juga memberikan pandangan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah membantu mempercepat proses administrasi keuangan. Penginputan data anggaran, verifikasi dokumen, hingga penyusunan laporan dapat dilakukan secara lebih sistematis. Meskipun demikian, efektivitas penggunaan sistem masih dipengaruhi oleh kesiapan dokumen dari pelaksana kegiatan dan stabilitas jaringan internet.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, koordinasi antarpegawai dalam pengelolaan keuangan telah berjalan dengan baik. Setiap pejabat memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga proses pengelolaan anggaran dapat berjalan secara tertib. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni secara umum berada dalam kategori baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

3.1.2 Proses pengelolaan keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran.

Berdasarkan hasil Wawancara, proses pengelolaan keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Setiap tahapan pengelolaan keuangan melibatkan berbagai pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, hingga operator yang bertugas dalam pengelolaan administrasi dan sistem informasi keuangan. Keterlibatan seluruh unsur tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui koordinasi yang terstruktur sehingga setiap tahapan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, usulan program dan kegiatan dibahas bersama dengan pimpinan serta disesuaikan dengan pagu anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Menurut informan, proses perencanaan menjadi tahapan yang sangat penting karena akan menentukan arah pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Informan juga menjelaskan bahwa dalam penyusunan anggaran, setiap bidang diberikan kesempatan untuk mengusulkan program sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh usulan kemudian diverifikasi berdasarkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, program yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan organisasi sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Dinas yang menjelaskan bahwa penyusunan anggaran tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melibatkan berbagai pihak, baik di lingkungan DP3AKB maupun pemerintah daerah. Menurut informan, koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi bagian penting dalam proses penyusunan anggaran agar program yang direncanakan memperoleh dukungan pendanaan yang memadai.

Setelah proses perencanaan selesai, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus didukung oleh dokumen administrasi yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pencairan anggaran dilakukan melalui mekanisme pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara berjenjang untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Bendahara Pengeluaran, ketelitian dalam proses administrasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kelancaran pelaksanaan anggaran. Setiap dokumen yang diajukan harus diperiksa terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut. Apabila ditemukan dokumen yang belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan, maka proses pencairan anggaran akan ditunda hingga seluruh persyaratan dipenuhi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengendalian internal agar penggunaan anggaran tetap berada pada jalur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilakukan segera setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti transaksi yang sah sehingga memudahkan proses pemeriksaan oleh aparat pengawas maupun auditor eksternal. Dengan demikian, laporan keuangan yang disusun dapat menggambarkan kondisi penggunaan anggaran secara objektif dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hasil wawancara dengan Operator Bagian Perencanaan dan Keuangan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mempermudah proses penginputan data anggaran, pencatatan realisasi belanja, verifikasi dokumen, serta penyusunan laporan keuangan secara elektronik.

Operator juga menjelaskan bahwa sistem informasi tersebut mampu meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan data karena setiap transaksi harus melalui proses verifikasi sebelum dapat diproses lebih lanjut. Selain itu, penggunaan sistem berbasis elektronik juga mempermudah proses monitoring realisasi anggaran sehingga pimpinan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Meskipun demikian, penggunaan aplikasi keuangan belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator lainnya, masih terdapat beberapa kendala teknis yang sering dihadapi, antara lain gangguan jaringan internet, perubahan aplikasi, keterlambatan penginputan data, serta keterlambatan penyampaian dokumen dari pelaksana.

kegiatan. Kondisi tersebut terkadang menyebabkan proses pelaporan menjadi lebih lama dibandingkan dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun, melalui koordinasi yang baik antarpegawai, hambatan tersebut dapat segera diatasi sehingga tidak mengganggu keseluruhan proses pengelolaan keuangan.

Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Laporan tersebut memuat informasi mengenai realisasi anggaran, perkembangan pelaksanaan program, serta penggunaan dana pada setiap kegiatan. Seluruh laporan disusun berdasarkan dokumen yang telah diverifikasi sehingga memiliki tingkat keandalan yang tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, seluruh tahapan pengelolaan keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Kepala Dinas berperan sebagai pengambil keputusan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab dalam pengendalian administrasi dan perencanaan anggaran, Bendahara Pengeluaran mengelola transaksi keuangan dan pertanggungjawaban belanja, sedangkan operator melaksanakan administrasi dan pengelolaan data melalui sistem informasi keuangan. Pembagian tugas tersebut mencerminkan adanya sistem kerja yang terstruktur dan saling mendukung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni telah mengikuti tahapan yang diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Walaupun masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif, proses pengelolaan keuangan secara umum telah berjalan dengan baik karena didukung oleh koordinasi antarpegawai, penerapan sistem informasi keuangan, serta komitmen seluruh pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.3 Kendalah dan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni Serta Upaya yang dilakukan untuk Mengatasinya

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa secara umum kinerja keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan. Kepala DP3AKB menjelaskan bahwa salah satu kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan anggaran, kondisi geografis Kabupaten Teluk Bintuni yang cukup luas, serta ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, perubahan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga menuntut aparatur untuk terus menyesuaikan diri agar pelaksanaan anggaran tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan beberapa kegiatan memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar, sedangkan perubahan regulasi mengharuskan seluruh pengelola keuangan untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan administrasi keuangan.

Informasi tersebut diperkuat oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, serta ketersediaan sarana pendukung. Menurut informan, keterlambatan pencairan anggaran juga menjadi salah satu kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

Sementara itu, Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa kendala yang sering dihadapi berkaitan dengan proses administrasi keuangan, seperti keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban, perubahan regulasi, serta penyesuaian terhadap sistem informasi keuangan yang digunakan. Namun demikian, seluruh kendala tersebut diupayakan untuk diselesaikan melalui peningkatan koordinasi, pemeriksaan dokumen secara lebih teliti, serta penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pendapat tersebut juga didukung oleh Operator Bagian Perencanaan dan Keuangan yang menjelaskan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah membantu proses administrasi keuangan menjadi lebih efektif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet, perubahan aplikasi, serta keterlambatan penyampaian dokumen dari pelaksana kegiatan. Kondisi tersebut terkadang mempengaruhi kecepatan proses penginputan data dan penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, penguatan koordinasi antarpegawai, evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, serta optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni tidak hanya berasal dari faktor internal organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang berada di luar kendali instansi. Meskipun demikian, melalui koordinasi yang baik, peningkatan kompetensi aparatur, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, berbagai kendala tersebut dapat diminimalkan sehingga kinerja keuangan organisasi tetap dapat dipertahankan dengan baik.

3.2 Pembahasan Penelitian

3.2.1 Kinerja Keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni Berdasarkan Prespektif dan Pengalaman Para Pengelola Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan organisasi dalam merealisasikan sebagian besar program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta melaksanakan pengelolaan anggaran secara tertib dan akuntabel. Selain itu, para pengelola keuangan memiliki pemahaman bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat **Mahmudi (2019)** yang menyatakan bahwa kinerja keuangan sektor publik merupakan gambaran kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, DP3AKB telah menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni telah mencerminkan pengelolaan keuangan yang cukup baik. Meskipun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan optimalisasi pemanfaatan anggaran tetap diperlukan agar kinerja keuangan dapat terus ditingkatkan.

3.2.2 Pembahasan Proses Pengelolaan Keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni Mulai dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Hingga Pelaporan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan daerah, yaitu dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Setiap tahapan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat berjalan secara terkoordinasi.

Temuan tersebut sesuai dengan teori **Mardiasmo (2018)** yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AKB telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui penyusunan perencanaan yang sistematis, pelaksanaan anggaran berdasarkan prosedur, serta penyusunan laporan keuangan yang didukung oleh dokumen pertanggungjawaban yang lengkap.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, proses pengelolaan keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, peningkatan koordinasi antarbidang, pemanfaatan teknologi informasi, serta ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen administrasi masih perlu terus ditingkatkan agar proses pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif.

3.2.3 Kendala dan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Serta Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasinya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kompetensi sumber daya manusia, kualitas administrasi, dan koordinasi antarpegawai. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi geografis wilayah, perubahan regulasi, keterlambatan pencairan anggaran, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem informasi keuangan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat **Halim (2017)** yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, perencanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, berbagai kendala yang muncul perlu diatasi melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan koordinasi, evaluasi secara berkala, dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil penelitian, DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain melalui pelatihan bagi pegawai, peningkatan koordinasi antarbidang, evaluasi pelaksanaan anggaran, serta pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Teluk Bintuni**, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Kinerja keuangan DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni secara umum telah berjalan dengan baik**, yang ditunjukkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta adanya komitmen seluruh pengelola keuangan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. **Proses pengelolaan keuangan pada DP3AKB telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan daerah**, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh koordinasi yang baik antar pengelola keuangan.
3. **Kinerja keuangan DP3AKB masih dipengaruhi oleh beberapa kendala**, seperti keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi, kondisi geografis wilayah, keterlambatan pencairan anggaran, dan kendala teknis sistem informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, DP3AKB telah melakukan berbagai upaya melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan koordinasi, evaluasi pelaksanaan anggaran, serta optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **DP3AKB Kabupaten Teluk Bintuni** perlu terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan regulasi.
2. **Koordinasi dan evaluasi** antar pengelola keuangan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk meminimalkan kendala administrasi, mempercepat penyerapan anggaran, dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
3. **Penelitian selanjutnya** diharapkan dapat mengkaji kinerja keuangan dengan ruang lingkup yang lebih luas, menggunakan indikator yang lebih beragam, atau membandingkan dengan organisasi perangkat daerah lainnya sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, Deddi, & Hertianti, Ayuningtyas. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putra, (Nama depan tidak dicantumkan). 2020. *Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan OPD*. (Perlu dilengkapi sumber/jurnal).
- Sari, (Nama depan tidak dicantumkan). 2019. *Pengaruh Kualitas SDM dan Sistem Pengawasan terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. (Perlu dilengkapi sumber/jurnal).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.